

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia sedang menghadapi penyebaran virus Corona atau Covid-19. Di bidang kesehatan banyak sekali yang sudah menjadi korban terjangkitnya virus tersebut, baik yang berhasil sembuh maupun meninggal dunia. Menurut WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, pandemi Covid-19 bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, melainkan juga mengancam kesehatan secara mental (Aris Ariyanto, 2021).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Coronavirus (Cov) atau Covid-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China, dan menyebar ke lebih dari 190 negara termasuk Indonesia. Virus tersebut menjadi perhatian dan kepanikan masyarakat setelah diumumkan adanya dua warga negara Indonesia yang dinyatakan positif virus Corona atau Covid-19.

Covid-19 secara bertahap akan menempatkan Indonesia pada jalur strategis menuju potensi krisis, memungkinkan Indonesia untuk bersiap menghadapi krisis ekonomi yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan pendapatan pemerintah, peningkatan pengeluaran dan pembiayaan pemerintah, serta memburuknya kinerja ekonomi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah untuk menghitung sejumlah kebijakan terkait berbagai aspek penyebaran Covid-19, misalnya aspek kesehatan dalam masyarakat (Auliya & Arif, 2021)

Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia sangat jelas. Menurut (Mohamad Ikhsan Modjo, 2020) sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak luput dari gejolak dunia akibat pandemi Covid-19. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut (Auliya & Arif, 2021) kondisi perekonomian Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi ini yang mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia semakin parah. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah telah menyerukan pengembangan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi dampak dari adanya pandemi covid-19 ini.

Dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia mendorong pemerintah mengeluarkan pedoman sebagai bentuk respons terhadap resiko ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang harus berdaya saing. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan fiskal publik dan stabilitas sistem keuangan untuk memerangi pandemi virus corona (Covid-19) guna menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan menjadi hukum Undang-Undang. *Sumber:* <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19> (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | *Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19*, n.d.)

Pandemi covid-19 berdampak terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang harus menghentikan usahanya karena berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19. Namun, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstimulus UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi covid-19. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian rakyat secara nasional, saat ini pemerintah harus memberi perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi kemajuan UMKM. Permasalahan pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, macam-macam, saat ini masalah perkembangan UMKM terdiri dari kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan pola eksploitasi UMKM terdiri dari akumulasi modal, penciptaan ketergantungan secara ekonomi maupun secara sosial, dan struktur pasar yang monopolitis (Hadion Wijoyo, Anita Ratnasari Rakhatullah, 2021).

Di tingkat perekonomian global, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik dan eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Presiden Jokowi menyatakan kesiapannya untuk mendukung UMKM dalam menanggulangi keadaan tersebut, sebagaimana terlihat dalam berita yang dimuat Jpnn.com. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka sesi terbatas Program Mitigasi Covid-19 bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rabu, 15 April 2020 (*Jokowi Upayakan Bantu UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 - Istana Di Nasional JPNN.Com, n.d.*)

Dari pemberitaan di atas, Presiden Jokowi menitikberatkan pada ketahanan UMKM di masa wabah pandemic covid-19 agar tidak menimbulkan masalah ekonomi baru yang menimbulkan keresahan sosial. Menurut (Pakpahan, 2020) kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41% pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia(depkop.go.id, 2018).

Namun, perkembangan UMKM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang mengakibatkan daya saingnya masih rendah dibandingkan dengan produk impor. Kondisi pandemi saat ini menghambat perkembangan UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung perlindungan UMKM di masa pandemic covid-19 dengan memperhatikan regulasi produksi. Peraturan tersebut merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2020. Salah satu arahannya adalah mengatur insentif ekonomi bagi UMKM dan pelaku ekonomi.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan komersialisasi usaha kecil menengah menggunakan teknologi yang tepat guna. Pemerintah mendorong kerja sama industri, pemerintah, dan akademisi untuk berkolaborasi dalam riset dan membuka peluang investasi. Tujuan pemerintah untuk mempersiapkan unsur-unsur UMKM untuk tumbuh dan berkembang di era teknologi internet. Karena UMKM mampu menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM. Hal terkait dengan gaya

hidup konsumen dan trend Revolusi Industri 4.0 semua aspek kehidupan tidak terlepas dari teknologi internet (Engel, 2014). Meski pandemi Covid-19 memunculkan masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul seperti sekarang di era revolusi industri 4.0. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Soetjipto, 2020).

Mengingat tantangan yang dihadapi UMKM, maka pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat memperhatikan UMKM terutama pada masa pandemic saat ini. Selanjutnya penulis akan menggali lebih dalam mengenai peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Tanjungpinang. Hal ini didasarkan pada banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang yang berisiko bangkrut akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian dan penurunan pendapatan masyarakat di masing-masing provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang dan buruk, skenario tentang ketahanan ekonomi masing-masing provinsi dan penurunan pendapatan bagi pelaku ekonomi.

Pandemi Covid-19 mengancam perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang bangkrut. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah karyawan yang dipulangkan. Sementara itu menurut data ada 4.415 UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.1
Data jumlah umkm terdampak covid-19 di Kepri

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UMKM TERDAMPAK COVID -19
1.	TANJUNGPINANG	4.415
2.	BATAM	8.229
3.	KARIMUN	1.831
4.	NATUNA	1.692
5.	BINTAN	257
6.	LINGGA	776

Sumber: ODS Kepri & Data Manual Kab. & Kota

Pada masa pandemi Covid-19 sektor UMKM sangat berdampak signifikan mulai dari penurunan omset, gangguan arus kas dan kredit macet, hingga peningkatan PHK. Banyak pedagang yang merasakan dampak pandemi Covid-19 ini mulai dari pedagang di pinggir jalan sampai dengan pedagang keliling jalanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap krisis ekonomi sejauh ini negatif, mencapai 5,32%, jauh dari krisis tahun 1998 dan 2008. Data terakhir menunjukkan bahwa 98% operator ekonomi di sekitar 68 juta perusahaan terpengaruh.

Maka dengan hal tersebut para pengusaha dipaksa untuk mencari celah baru guna kehidupan yang baru, cara-cara baru yang bisa menunjang bangunya kembali ekonomi yang lesu akibat pandemi ini. Selanjutnya sosial distancing dan ketidakpastian situasi ini selanjutnya mengarah kepada krisis ekonomi global. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi dan sosial pada masyarakat, sehingga menyebabkan penurunan permintaan (Setiawan, 2020)

Pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau di masa pandemi covid-19 tepatnya di Kota Tanjungpinang menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi Pemerintah juga tetap mengupayakan bagaimana perekonomian tetap stabil dan tidak turun tanpa mengesampingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dengan memberikan bantuan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang maupun pelaku usaha yang ada di Tanjungpinang.

Dengan adanya pandemi covid-19 ini, sangat berdampak pada sektor ekonomi salah satu nya sektor UMKM, yang banyak mengalami kendala, antara lain, sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Sehingga pemerintah cukup banyak memberikan perhatian kepada sektor UMKM. Sejumlah inovasi dilakukan untuk memulihkan ekonomi dengan kegiatan yang berbasis UMKM guna membangkitkan perekonomian yang sedang melemah juga menciptakan lapangan pekerjaan melalui sektor UMKM. Pemerintah Kota Tanjungpinang juga sudah mulai melakukan padat karya diantaranya mengawal sekitar 12.000 UMKM dan memberikan pelatihan untuk 1.000 UMKM di tahun 2021 yang kegiatannya tersebar di beberapa OPD, diantaranya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Disperdagin, DP3APM dan Dinas Sosial.

Selain pelatihan, Pemerintah juga sudah melakukan kerjasama dengan Swalayan dan BRC lagoi untuk mempromosikan produk dari pelaku UKM yang terdata di Pemko Tanjungpinang secara gratis. Serta disiapkan juga bantuan langsung kebutuhan peralatan UKM melalui dana CSR bersama Bank Riau Kepri Syariah. Dalam pemulihan ekonomi, pemko mengandeng pihak perbankan

melalui dana CSR untuk membantu para pelaku UMKM. Dana CSR ini diberikan dalam bentuk barang untuk menunjang usaha mikro kecil menengah.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Tanjungpinang. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada masa pandemi.

Pemerintah kota Tanjungpinang sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah mengusulkan sebanyak 1.195 UMKM sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebesar 1,2 juta dari pemerintah pusat, namun yang dinyatakan lulus hanya 365 UMKM di Tanjungpinang, selain itu pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tanjungpinang, pemerintah pusat telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020.

Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan pemulihan ekonomi. Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantuan bagi dunia usaha, khususnya

bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi.

Dalam menghadapi krisis kapitalisme global yang secara periodik akan selalu hadir, UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi perlu menyiapkan diri dan mendapatkan perhatian dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga pelaku usaha besar, masyarakat secara umum dan pelaku UMKM sendiri. Sinergi ini sangatlah diperlukan untuk menguatkan eksistensi UMKM. dalam gempuan krisis global baik sekarang maupun nanti yang akan datang. Untuk itu kita perlu menggali berbagai potensi dan keunikan dari UMKM di Indonesia, agar dalam merumuskan berbagai kebijakan atau program dapat menungjung UMKM secara optimal (Fajar, 2015)

Menurut (Sarwono, Hartadi A Rijanto, 2015) usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu komponen terpenting dari ekonomi dan pembangunan Negara, mengingat sektor UMKM merupakan motor penggerak perekonomian nasional, maka diperlukan strategi pengembangan untuk meningkatkan potensi sektor UMKM. Hal ini diperlukan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi negara agar efisien dan kompetitif di bawah pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dunia. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah membuat gambaran sektor usaha mikro di Kota Tanjungpinang yang bisa kita lihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Sektor Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Tanjungpinang, tak sedikit pula dari mereka yang mengalami penurunan pendapatan tetapi dipaksa harus tetap bertahan, sebagaimana yang telah penulis temukan beberapa contoh kasus dilapangan yang bisa kita lihat secara lansung berikut ini:

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan bahwasannya para pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang sangat merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Dimasa pandemic covid-19 ini para pelaku umkm merasakan penurunan sejak diberlakukannya PSBB secara ketat, jadi ntuk keberlangsungan usahanya para pelaku umkm yang ada di Kota Tanjungpinang berupaya untuk memasarkan produk makanannya secara optimal. Strategi pemasaran yang digunakan ditengah pandemic covid 19 yaitu dengan memasarkan produk melalui media sosial seperti Facebook dan Whatsapp, dapat diketahui bahwa pemanfaatan internet dan media

sosial untuk memasarkan hasil produksi dimasa pandemic ini sangat tepat dan bermanfaat, hal ini tentunya bisa memperkuat pendapatan dikarenakan yang kita tau bahwa dimasa pandemic ini UMKM sangat berdampak mulai dari penurunan omset penjualan hingga penurunan pelanggan. Dampak pandemic covid 19 terhadap para pelaku UMKM terjadi penurunan hampir 50% dari pendapatan biasanya.

Pada penelitian ini, peneliti lebih mamfokuskan pada UMKM yang jadi binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro. Seperti yang kita ketahui bahwasannya UMKM binaan ini pun pada awalnya hanya pelaku usaha biasa sampai pada akhirnya mereka mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu UMKM binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mereka memfokuskan diri mengikuti berbagai kegiatan yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro seperti pelatihan, bimbingan, dan mengikuti berbagai program yang ada. Usaha yang di jalankan juga beragam, mulai dari kuliner, fashion, jasa dan industry.

Permasalahan yang sering di hadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses mengenai informasi, kurangnya keahlian dan kualitas SDM yang tidak memadai hingga kemampuan teknologi yang terbatas. Permasalahan UMKM lain yang tidak kalah seriusnya adalah lemahnya akses informasi pasar sehingga pemasaran produk kurang mempunyai daya saing di pasar global.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah dan pemerintah

daerah melakukan upaya untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. Bantuan Pemerintah bagi usaha mikro diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Negara kepada usaha Mikro Dalam pemulihan perekonomian nasional dalam menghadapi ancaman yang mendukung ancaman terhadap perekonomian nasional selama pandemi Covid-19. Terkait Peraturan dimaksud, tugas Pemerintah Daerah adalah sebagai salah satu Lembaga Pengusul dengan melakukan rekapitulasi data pelaku usaha mikro Kota Tanjungpinang terdampak Covid-19 untuk disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Berikut data yang menggambarkan jumlah usaha mikro di Kota Tanjungpinang selama 5 (Lima) tahun terakhir.

Gambar 1.2

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (2020-2021)

Berdasarkan gambar diatas, terjadinya kenaikan data pelaku usaha mikro pada tahun 2020, didorong oleh program Bantuan Pelaku Usaha Mikro dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana Dinas yang membidangi usaha mikro ditunjuk sebagai salah satu lembaga pengusul yang bertugas merekapitulasi data usulan pelaku usaha mikro terdampak covid-19.

Di masa pandemi covid-19, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro telah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi untuk mendorong pelaku usaha agar tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi covid-19. Dimana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro telah menerapkan berbagai kebijakan untuk membantu pelaku usaha bertahan, berkembang, dan memulai bisnis baru selama pandemi covid-19 ini. Selain itu, sistem permodalan baru untuk pelaku usaha akan diluncurkan. Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tahun 2020-2021 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dengan pihak Perbankan bekerjasama dalam memberikan sosialisai kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan antara lain :

1. Sosialisasi di buat agar masyarakat bisa mendapatkan akses khususnya pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman melalui KUR.
2. Bantuan Tak Terduga, sebagai implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2020, diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan sarana usaha mikro kepada pelaku usaha terdampak covid 19.

Adapun program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai salah satu bentuk untuk mengatasi permasalahan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Penganggaran APBD untuk subsidi pinjaman kepada pelaku usaha mikro, sehingga bunga pinjaman menjadi nol persen, dalam hal ini bekerjasama dengan BPR Kota Tanjungpinang dibawah pengawasan OJK.
2. Membuat dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.
3. Membuat sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.
4. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
5. Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan, adapun hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama masa pandemi covid-19 ini adalah terkait masalah modal usaha yang terbatas, distribusi tidak tepat, pengelolaan keuangan tidak efisien, kurangnya inovasi, hingga belum maksimalnya pemasaran online. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2020-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai dasar dalam melakukan penelitian, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan dan program pemulihan ekonomi dan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat membuka perspektif baru dalam pendidikan dan menghasilkan penelitian terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas.

Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Mahasiswa

1. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Tanjung Pinang.
2. Dapat mengaplikasikan teori atau ilmu yang didapat dalam perkuliahan.

- c. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pimpinan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro untuk menjalankan perannya guna membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemic covid-19 di Kota Tanjungpinang.

